

ANALISIS KINERJA DAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH: KASUS APBD KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2018-2020

Mahpudin¹, Fransisca Mega Lestari²

¹Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

²Departemen Politik Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada

E-mail: Mahpudin.ip@untirta.ac.id¹; fransisca.megalestari@mail.ugm.ac.id²

ABSTRAK

Desentralisasi fiskal yang diterapkan sejak era reformasi memberi peluang yang cukup besar kepada daerah untuk mengelola keuangan secara mandiri sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Selain itu, daerah memiliki keleluasaan menggali potensi sumber daya di daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Namun, kewenangan yang besar ini tidak selalu berkorelasi positif. Hal tersebut dapat dilihat dari bagaimana kebijakan tata kelola penganggaran dijalankan. Artikel ini berusaha menganalisa anggaran daerah untuk mengetahui bagaimana kinerja dan kemampuan anggaran daerah dengan mengambil kasus APBD Kabupaten Lebak tahun anggaran 2018-2020. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap sejumlah indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja tata kelola dan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Lebak periode anggaran 2018-2019 dapat disimpulkan bahwa secara garis besar kinerja keuangan (APBD) Kabupaten Lebak belum menunjukkan performa yang baik. Berbagai indikator memperlihatkan hasil kurang memuaskan dengan nilai persentase rendah.

Kata Kunci: Kinerja keuangan, APBD, Kabupaten Lebak

ABSTRACT

Fiscal decentralization which has been implemented since the reform era, has provided ample opportunities for regions to manage finances independently according to regional needs. In addition, regions have the freedom to explore potential resources to increase local revenue. However, this great authority is not always positively correlated. This can be seen from how the budgeting governance policies are implemented. This article attempts to analyze the regional budget to find out how the performance and capability of the regional budget is by taking the case of the Lebak Regency Budget for the 2018-2020 fiscal year. Based on the results of the examination of several indicators used to measure the performance of governance and regional financial capacity of Lebak Regency for the 2018-2019 budget period, it can be concluded that in general the financial performance (APBD) of Lebak Regency has not shown good performance. Various indicators show satisfactory brackets with low percentage values.

Keywords: Financial performance, APBD, Lebak Regency

PENDAHULUAN

Kajian ini membahas tentang kinerja pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Analisa tentang anggaran daerah menjadi penting dilakukan untuk menguji seberapa jauh anggaran yang dikelola pemerintah daerah berkontribusi dalam mendorong percepatan pertumbuhan pembangunan

daerah, serta yang lebih penting meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Hal ini senada dengan semangat lahirnya ide desentralisasi yang memberikan kewenangan lebih besar kepada daerah sejak tahun 1999. Daerah memiliki keleluasaan yang lebih dinamis dalam mengatur urusan rumah tangga daerahnya dalam arena sosial, politik, dan

ekonomi (Ahmad & Ali, 2011; Booth, 2003).

Salah satu transformasi besar sebagai implikasi dari desentralisasi adalah desentralisasi fiskal. Daerah memiliki kewenangan untuk mengelola keuangan daerah dan menggali berbagai potensi sumber daya di daerah untuk dikonversi menjadi pendapatan asli daerah. Desentralisasi fiskal diharapkan mampu melepaskan dominasi dan intervensi pemerintah pusat terhadap daerah. Implikasinya, pemerintah daerah saat ini mengemban tugas dan tanggungjawab yang besar untuk membangun daerahnya melalui kinerja tata kelola keuangan yang sehat dengan menerapkan prinsip *good governance* (Sijabat, 2016; Kyriacou & Roca, 2011; Brojonegoro & Asanuma, 2000; Pepinsky & Wihardja, 2011).

Studi tentang pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan daerah dan kesejahteraan masyarakat lokal telah banyak dilakukan. Hasil studi menunjukkan variasi yang sangat beragam di berbagai daerah. Beberapa studi memperlihatkan korelasi yang positif, tetapi banyak pula yang menunjukkan hasil negatif (Saputra & Mahmudi, 2012; Abdillah & Mursinto, 2014; Samekto, 2012; Ezcurra, 2015). Berangkat dari sini, kajian ini berupaya membedah anggaran daerah untuk melihat seberapa sehat kinerja tata kelola keuangan daerah.

Secara spesifik kajian ini berfokus pada analisis APBD Kabupaten Lebak, Provinsi Banten tahun anggaran 2018, 2019, dan 2020.

Alasan mengapa Kabupaten Lebak dipilih dalam kajian ini dengan pertimbangan dua hal: pertama, Kabupaten Lebak mendapat kategori sebagai daerah tertinggal di Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019. Kenyataan ini cukup mencengangkan sebab Kabupaten Lebak secara letak geografis dekat dengan DKI Jakarta, Ibukota Negara. Idealnya, proses penetrasi pembangunan tidak mengalami hambatan. Selain itu, Kabupaten Lebak memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah dan lengkap berupa laut, pertanian, perkebunan, pegunungan, dan pertambangan. Idealnya, potensi tersebut menjadi modal penting untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Kedua, terjadi pergeseran yang ‘radikal’ terkait rencana pembangunan daerah sebagaimana tertuang dari visi misi kepala daerah. Pada periode 2013-2018, visi-misi kepala daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD adalah “Menjadikan Kabupaten Lebak Cerdas, Sehat dan Sejahtera”. Sementara periode 2019-2024 berubah menjadi “Lebak Sebagai Destinasi Wisata Unggulan Nasional Berbasis Potensi Lokal”. Melihat

visi 2013-2018 terlihat menekankan pelayanan dasar terkait pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Sedangkan, visi 2019-2024 lebih menekankan pada aspek pariwisata.

Dua point pertimbangan tersebut memunculkan pertanyaan, bagaimana konsistensi antara perencanaan dan anggaran daerah. Apakah anggaran daerah yang dikelola telah sesuai dengan kebutuhan daerah dan mampu menjawab persoalan di Kabupaten Lebak. Anggaran menjadi penting untuk dianalisis sebab program dan kegiatan pemerintah tidak akan terlaksana tanpa ditopang oleh anggaran. Di sisi lain, kinerja keuangan yang sehat menjadi salah satu indikator untuk melihat bagaimana program dan kegiatan pemerintah direalisasikan.

Kajian ini tidak semata hanya membedah dan menganalisa anggaran daerah Kabupaten Lebak, tetapi kajian ini berupaya menawarkan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan kepada stake holder terkait dalam mewujudkan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang sehat untuk mendorong pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, kajian ini akan dimulai dengan menguraikan deskripsi analitis APBD Kabupaten Lebak dilihat dari tahun anggaran 2018, 2019, dan 2020. Deskripsi analitis tersebut digunakan untuk

merumuskan beberapa point saran dan rekomendasi.

METODE PENELITIAN

Kajian ini tentang analisis anggaran daerah Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Data diperoleh melalui data sekunder yang menyajikan informasi terkait anggaran daerah seperti APBD, realisasi anggaran, dokumen perencanaan daerah, dan BPS yang memiliki kaitan dengan konteks Kabupaten Lebak dari tahun 2018 sampai 2020. Analisa anggaran pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang strategis dalam menyediakan fungsi pelayanan umum dasar di Kabupaten Lebak seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Dinas Pariwisata, juga turut dianalisis untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang kinerja dan kemampuan keuangan daerah.

Adapun ruang lingkup analisis anggaran daerah yang digunakan pada kajian ini meliputi 16 indikator sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah per kapita
2. Ruang Fiskal Daerah
3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
4. Rasio Efektivitas
5. Rasio efisiensi
6. *Share and Growth*
7. Analisa Varian Pendapatan
8. Analisis Pertumbuhan Pendapatan

9. Analisis varian Belanja
10. Analisis Pertumbuhan Belanja
11. Kemampuan Mendanai Belanja Daerah
12. Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja
13. Belanja Pegawai Terhadap Belanja Daerah

Selain menganalisa 13 indikator tersebut untuk menilai kinerja dan kemampuan anggaran daerah Kabupaten Lebak, analisa juga diperkaya dengan mempertimbangkan informasi dari data lainnya seperti data BPS, dokumen perencanaan daerah, dan literatur lain yang menggambarkan potensi dan masalah yang ditemukan di Kabupaten Lebak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Singkat Kabupaten Lebak, Provinsi Banten

Kabupaten Lebak merupakan wilayah yang berada di Provinsi Banten. Kabupaten Lebak memiliki luas wilayah 304.472 ha atau sekitar 3.305, 07 km., hampir lima kali luas wilayah Provinsi DKI Jakarta. Kabupaten Lebak terdiri dari

28 kecamatan, 340 desa dan 5 kelurahan dengan jumlah penduduk sebanyak 1.302.608 jiwa. Pusat pemerintahan Kabupaten Lebak terletak di kecamatan Rangkasbitung.

Secara geografis, wilayah Kabupaten Lebak memiliki batas-batas sebagai berikut: di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Pandeglang; wilayah timur berbatasan dengan 3 daerah, yaitu kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Tangerang. Sementara di utara berbatasan dengan Kabupaten Serang dan sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia. Secara garis besar, wilayah Kabupaten Lebak terbagi memiliki topografi yang berbeda-beda. Di bagian barat dan utara merupakan wilayah yang berupa dataran rendah hingga perbukitan bergelombang. Di bagian selatan berupa dataran rendah yang relatif lebih sempit dari pesisir Samudera India sehingga wilayah ini memiliki banyak pantai dan potensi laut. Sedangkan wilayah yang bertopografi pegunungan berada di wilayah timur hingga tenggara (Lebak B., 2020).

Gambar 1. Peta Wilayah Kabupaten Lebak



Sumber: Lebakkab.go.id

Perbedaan topografi wilayah ini menjadi salah satu pertimbangan pemerintah daerah Kabupaten Lebak dalam menyusun rencana pembangunan wilayah. Wilayah Lebak Utara yang terdiri dari tujuh kecamatan (Rangkasbitung, Cikurur, Cimarga, Warunggunung, Maja, Kalanganyar, Curugbitung) didesain sebagai wilayah perdagangan dan industri dari hulu hingga hilir. Kawasan Lebak Barat dan Timur sebagai wilayah perbukitan dan pegunungan didesain

sebagai kawasan perkebunan dan pertanian. Sementara Lebak Selatan sebagai wilayah yang memiliki karakteristik wilayah yang unik, yaitu sebagian berada di pegunungan dan sebagian yang lain di daerah pantai sehingga wilayah ini didesain untuk pembangunan di bidang pertanian, perikanan laut, pariwisata, dan pertambangan. Untuk memperjelas deskripsi wilayah di Kabupaten Lebak, akan disajikan tabel berikut ini.

Tabel 1. Zona Wilayah Lebak berdasarkan jumlah penduduk, topografi, dan proyeksi pembangunan

Zona Wilayah Kab. Lebak	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Kondisi Topografi	Proyeksi Pembangunan
Utara	Rangkasbitung	124668	Dataran rendah hingga perbukitan bergelombang	Perdagangan dan industri termasuk industri pengolahan hasil pertanian.
	Warunggunung	56292		
	Cikurur	50290		
	Cimarga	65502		
	Maja	54402		
	Curugbitung	32788		
	Kalanganyar	34547		
Selatan	Cibadak	62174	Pegunungan dan	Pertanian, tanaman
	Malingping	66019		

	Wanasalam	55098	Laut	pangan, perikanan laut, pertambangan, pariwisata
	Cijaku	29364		
	Panggarangan	38534		
	Bayah	32205		
	Cilograng	34667		
	Cibeber	58915		
	Cigemblong	21733		
	Cihara	32205		
Timur	Cipanas	49102	Perbukitan dan Pegunungan	Pertanian dan perkebunan
	Muncang	34361		
	Sobang	31047		
	Leuwidamar	54354		
	Sajira	50153		
	Bojongmanik	23420		
	Lebakgedong	23495		
	Cirinten	27130		
Barat	Cileles	50594	Hutan dan pegunungan	Perkebunan dan pertanian
	Gunungkencana	35492		
	Banjarsari	61871		

Sumber: data diolah dari Lebak B., 2020

Berdasarkan informasi yang tersaji pada tabel diatas dapat diketahui bahwa Kabupaten Lebak memiliki potensi sumber daya alam yang memadai terutama dalam aspek pertanian. Hal ini diperkuat oleh kenyataan bahwa mayoritas masyarakat bekerja pada sektor pertanian. Sementara pekerjaan pada sektor jasa dan pemerintahan sangat rendah dan hanya terkonsentrasi pada wilayah Lebak Utara khususnya di Kecamatan Rangkasbitung sebagai ibukota Kabupaten Lebak.

Pembangunan di Kabupaten Lebak dapat dilihat dari perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM menjadi barometer yang diperkenalkan oleh *United Development Programme* (UNDP) sejak tahun 1990 untuk menilai bagaimana penduduk pada suatu wilayah dapat mengakses hasil pembangunan dilihat dari tiga indikator yaitu pendidikan,

kesehatan dan ekonomi. Secara garis besar, perkembangan IPM di Kabupaten Lebak mengalami peningkatan setiap tahun. Kendati demikian, peningkatan tersebut tidak signifikan. Pada tahun 2017, IPM kabupaten Lebak hanya menempati angka 62, 95 %. Angka tersebut naik tipis dari 62, 78 % pada tahun 2016 (Lebak, 2018).

Apabila dibandingkan secara nasional, tingkat pertumbuhan di Kabupaten Lebak pada tahun 2017 menempati posisi ke 444 dari 514 kabupaten dan kota di Indonesia (Lebak, 2018). Jika dikomparasikan dengan kabupaten/kota terdekat di Provinsi Banten, Kabupaten Lebak menempati posisi terakhir sebagai daerah dengan tingkat pertumbuhan yang paling rendah. Berangkat dari realita ini, Kabupaten Lebak mendapat predikat sebagai daerah

tertinggal pada tahun 2015 berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan daerah Tertinggal Tahun 2015-2019. Ironisnya, wilayah kabupaten Lebak secara geografis termasuk memiliki jarak yang dekat dengan ibukota negara, DKI Jakarta yaitu 98 km dengan jarak tempuh normal sekitar 2-3 jam.

Masyarakat di Kabupaten Lebak yang masuk dalam kategori miskin pada tahun 2018 mencapai 8,41 persen atau sebanyak 108.901 orang dari 1,2 juta penduduk. Fakta ini menempatkan Kabupaten Lebak sebagai daerah termiskin kedua di Provinsi Banten setelah Kabupaten Pandeglang. Sementara potret pendidikan di Kabupaten Lebak mengungkap bahwa di tahun 2017, rata-rata lama sekolah penduduk di Lebak berkisar pada angka 6,20. Artinya, mayoritas masyarakat mengenyam pendidikan sampai pada jenjang Sekolah Dasar (SD). Padahal pemerintah Lebak menargetkan harapan lama sekolah mencapai angka 11,92 atau setingkat lulusan SMA sederajat sebagaimana program pemerintah pusat terkait wajib belajar 12 tahun dari jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah atas.

Sedangkan dari kondisi kesehatan salah satunya dapat dilihat dari rata-rata usia harapan hidup. Di tahun 2017, angka harapan hidup masyarakat Lebak berada di

usia 66, 59 tahun, lebih rendah jika dibandingkan dengan angka rata-rata nasional yang mencapai 70, 1 tahun. Deskripsi ini menjelaskan bahwa kondisi pembangunan di Kabupaten Lebak termasuk lamban.

Analisa Kinerja dan Kemampuan Anggaran Daerah

Analisis kinerja dan kemampuan anggaran daerah merupakan salah satu pendekatan yang digunakan untuk menilai seberapa sehat pengelolaan keuangan daerah. Anggaran daerah yang dimaksud yaitu APBD. Kajian ini menganalisa APBD Kabupaten Lebak dilihat dari tiga tahun anggaran (2018, 2019, 2020). Analisa APBD ini terdiri dari 13 indikator, sebagaimana diuraikan berikut.

1. Pendapatan daerah per kapita

Indikator ini menjelaskan nilai riil dari besarnya pendapatan daerah dengan cara membaginya dengan jumlah penduduk yang harus dilayani oleh pemerintah daerah. Dengan kata lain, pemerintah wajib menjamin bahwa seluruh penduduk yang ditinggal di wilayah tersebut dapat menerima dan mengakses layanan publik. Logikanya, semakin banyak jumlah penduduk, maka semakin besar beban tanggungjawab yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah.

Jumlah penduduk Kabupaten Lebak pada tahun 2019 sebanyak 1.293.224 jiwa. Sementara jumlah pendapatan riil APBD

di tahun 2018-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Jumlah Pendapatan Riil

	Jumlah Pendapatan Riil		
	2018	2019	2020
	2.504.433.551.432	2.676.822.234.189	2.547.087.060.222
Pendapatan per kapita	1.936.581	2.069.882	1.969.563

Sumber: Data sekunder diolah, 2021

Dengan asumsi bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Lebak dianggap sama pada tahun 2018, 2019, dan 2020 yaitu sebesar 1.293.224 jiwa, maka dapat dilihat bahwa besarnya pendapatan daerah per kapita pada tahun 2018 rata-rata sebesar 1,9 juta/jiwa. Angka ini naik tipis pada tahun 2019 menjadi 2 juta/jiwa. Namun, pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 1, 9 juta/jiwa. Mengacu pada hasil tersebut, besaran pendapatan daerah per kapita di Kabupaten Lebak termasuk rendah. Hal ini salah satunya karena faktor jumlah penduduk yang termasuk besar sehingga berdampak pada angka rasio. Implikasinya, meskipun rata-rata pendapatan daerah relatif besar, di atas 2 Triliun, namun angka pendapatan per kapita tergolong rendah.

Pendapatan daerah per kapita menjadi barometer untuk mengetahui sejauh mana perkembangan pembangunan ekonomi sosial di wilayah yang bersangkutan. Terdapat premis yang menyebut bahwa semakin besar pendapatan daerah per kapita, semakin maju pembangunan daerah tersebut. Dalam konteks ini, rata-rata pendapatan

daerah per kapita di Kabupaten Lebak yang tergolong rendah mengindikasikan bahwa laju pembangunan belum maksimal. Hal ini dipertegas oleh data BPS tahun 2017 bahwa angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lebak berkisar di point 62.

Menurut Bank Dunia, salah satu faktor yang menjelaskan rendahnya pendapatan daerah per kapita dipicu oleh tingkat pendidikan yang rendah. Kualitas pendidikan yang rendah berimplikasi pada minimnya keterampilan dan kapabilitas sumber daya manusia. Hal ini sangat relevan jika dikaitkan dengan kasus Kabupaten Lebak. Merujuk pada data BPS 2017, penduduk di Lebak rata-rata hanya lulusan SD.

2. Ruang Fiskal Daerah

Ruang fiskal merupakan suatu konsep untuk mengukur tingkat keleluasaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam mengalokasikan APBD untuk membiayai program dan kegiatan yang menjadi prioritas daerah. Mengacu pada standar aturan yang dikeluarkan oleh kementerian keuangan, rumus untuk menghitung ruang fiskal daerah diperoleh

dengan menghitung total keseluruhan pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang sudah ditentukan penggunaannya dan belanja yang sifatnya mengikat seperti DAK, Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus, Dana Darurat, Belanja Pegawai dan Belanja Bunga. Kemudian selanjutnya dibagi dengan keseluruhan Pendapatan Daerah.

Mengacu pada APBD Kabupaten Lebak, besarnya ruang fiskal tahun 2018, 2019, dan 2020 berturut-turut adalah 549,506,248,901, 553,827,082,108, dan

510,277,621,184. Dari angka tersebut dapat dilihat bahwa ruang fiskal daerah selama tiga tahun berada pada posisi yang sama yaitu sebesar 5% dari total pendapatan daerah. Ruang fiskal Kabupaten Lebak termasuk rendah. Hal tersebut dikarenakan tingginya jumlah pendapatan yang sudah ditentukan peruntukannya dan belanja wajib, terutama belanja pegawai yang mencapai hampir setengah dari jumlah keseluruhan total pendapatan daerah.

Tabel 3. Perbandingan Total Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah

Tahun anggaran	Total Pendapatan Daerah	Total Belanja Pegawai
2018	2.511.747.359.526	1.065.581.673.248
2019	2.734.655.051.800	1.099.710.831.483
2020	2.500.728.711.965	1.058.519.078.781

Sumber: Data sekunder diolah, 2021

Persentase ruang fiskal daerah yang ideal lebih dari 30% sehingga pemerintah daerah memiliki keleluasaan dalam membangun daerahnya. Dalam hal ini, konsistensi antara perencanaan dan penganggaran yang tertuang dalam APBD memiliki peran yang sangat penting. Ketersediaan ruang fiskal yang cukup menjadi penting bagi pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan tanpa menghambat kesinambungan keuangan pemerintah. Padahal, jika berkaca pada kondisi di Kabupaten Lebak yang memiliki potensi sumber daya alam yang signifikan termasuk potensi pariwisata, seharusnya dapat berkontribusi dalam

memperbesar ruang fiskal daerah melalui peningkatan PAD. Namun, hal tersebut belum tergalai secara optimal sebab kondisi kualitas infrastruktur yang baik belum merata di semua wilayah dan penetrasi investasi belum begitu menjanjikan. Oleh karena itu perlu ada upaya yang signifikan untuk mendorong perubahan ekonomi di Kabupaten Lebak.

3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah berupa pembangunan dan pelayanan publik. Hasil dari rasio ini menjadi barometer untuk

mengukur seberapa jauh daerah dapat mandiri menghasilkan sumber-sumber pendapatan daerah atau justru masih sangat bergantung pada sumber pendapatan yang berasal dari pihak eksternal, terutama pemerintah pusat. Oleh karenanya, rumus untuk menghitung rasio ini adalah total pendapatan asli daerah dibagi total keseluruhan pendapatan

daerah. Semakin tinggi pendapatan asli daerah, maka semakin mandiri keuangan daerah.

Halim (2002) membuat klasifikasi rasio kemandirian keuangan daerah untuk mempermudah dalam melakukan kategorisasi. Sebagaimana nampak pada tabel berikut:

Tabel 4. Pola hubungan dan tingkat kemandirian daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0-25	Instruktif
Rendah	25-50	Konsultatif
Sedang	50-75	Partisipatif
Tinggi	75-100	Delegatif

Sumber: Halim (2002)

Pola hubungan instruktif mengindikasikan bahwa daerah belum mampu mandiri dalam menghasilkan pendapatan asli daerah sehingga intervensi pemerintah pusat sangat kentara. Pola hubungan Konsultatif memperlihatkan intervensi pemerintah pusat mulai berkurang karena pemerintah daerah dianggap sedikit lebih mampu dalam menjalankan otonomi daerah. Pola hubungan Partisipatif menunjukkan campur tangan pemerintah pusat semakin

berkurang sebab daerah dianggap semakin efektif dalam menjalankan urusan otonomi. Sedangkan pola hubungan Delegatif adalah kategori yang ideal dimana intervensi pemerintah pusat tidak ada karena daerah dinilai mampu menjalankan otonomi.

Dalam konteks rasio kemandirian daerah di Kabupaten Lebak yang tertuang dalam APBD 2018, 2019, 2020 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5. Rasio Kemandirian keuangan daerah Kabupaten Lebak

Tahun anggaran	Pendapatan Asli Daerah	Total Pendapatan Daerah	Rasio Kemandirian Daerah	Pola Hubungan
2018	308.912.592.160	2.511.747.359.526	12 %	Instruktif
2019	333.766.548.700	2.734.655.051.800	12%	Instruktif
2020	338.941.257.475	2.500.728.711.965	13%	Instruktif

Sumber: Data sekunder diolah, 2021

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa rasio kemandirian keuangan daerah

Kabupaten Lebak tahun anggaran 2018-2020 cenderung stagnan. Dimana tahun

anggaran 2018 dan 2019, tingkat rasio kemandirian daerah berkisar di angka 12 %. Terdapat peningkatan pada tahun anggaran 2020 namun sangat tidak signifikan menjadi 13%. Pola hubungan yang terbentuk adalah instruktif yang menegaskan bahwa intervensi pemerintah pusat terhadap sumber penerimaan keuangan di Kabupaten Lebak masih sangat besar. Dengan kata lain, data dikatakan bahwa Kabupaten Lebak belum mandiri. Otonomi fiskal yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk menggali dan mengelola potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah ternyata belum berkontribusi secara signifikan dalam mewujudkan kemandirian daerah. Kabupaten Lebak masih bergantung kepada pemerintah pusat untuk mendapatkan bantuan keuangan dalam menjalankan urusannya.

Secara garis besar, pendapatan asli daerah terdiri dari pajak, retribusi, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lainnya yang sah. Pajak dan retribusi merupakan dua item sumber pendapatan asli daerah yang sangat penting bagi daerah yang bersangkutan. Jenis-jenis pendapatan yang termasuk pajak kabupaten/kota antara lain: pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan. Sementara jenis retribusi mencakup: jasa umum, jasa usaha, dan jasa perizinan.

Pada tahun 2019 misalnya, dari total penerimaan PAD sebesar Rp 333,766,548,700 terinci sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 6. Jenis PAD dan Persentase Rasio Jumlah Pendapatan

Jenis PAD	Jumlah Pendapatan	Persentase
Pajak	84.625.000.000	25%
Retribusi	21.622.621.100	7%
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	4.629.530.800	1%
Pendapatan lain yang sah	222.889.396,800.	67%
Total	333.766.548.700	100%

Sumber: Data sekunder diolah, 2021

Data diatas menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dari sektor pajak dan retribusi masih sangat kecil. Pemerintah Kabupaten Lebak hanya mampu mendapatkan penerimaan dari pajak 84 Miliar (25 %) dan retribusi 21

Miliar (7%). Padahal sektor pajak dan retribusi adalah bagian terpenting dalam menggenjot peningkatan pendapatan asli daerah. Artinya pemerintah Kabupaten Lebak belum optimal dalam mengelola dan menggali sumber-sumber pendapatan

di wilayahnya. Implikasinya, menjadi wajar apabila rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Lebak masih sangat rendah dengan tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat yang masih tinggi.

4. Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas menjelaskan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah

yang telah direncanakan dibandingkan dengan target pendapatan asli daerah. Hal ini sebagai barometer untuk menilai seberapa optimal kinerja keuangan pemerintah daerah dalam menggali dan mengelola potensi sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Indikator efektivitas kinerja keuangan sebagai berikut:

Tabel 7. Persentase Kinerja Keuangan

Persentase kinerja keuangan (%)	Kriteria
Di bawah 60	Tidak efektif
60-80	Kurang efektif
80-90	Cukup efektif
90-100	Efektif
Di atas 100	Sangat efektif

Sumber: Data sekunder diolah, 2021

Adapun rasio efektivitas keuangan Kabupaten Lebak tahun anggaran 2018-

2020 sebagaimana tersaji pada tabel berikut ini:

Tabel 8. Realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Target Pendapatan Asli Daerah

Tahun anggaran	Realisasi Pendapatan Asli daerah	Target Pendapatan Asli Daerah	Persentase	Keterangan
2018	349,479,362,707	308.912.592.160	113%	Sangat efektif
2019	334,722,679,400	333.766.548.700	100,2%	Sangat efektif
2020	377,504,404,119	338.941.257.475	111%	Sangat efektif

Sumber: Data sekunder diolah, 2021

Mengacu pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa rasio efektivitas keuangan Kabupaten Lebak tahun 2018-2020 sangat efektif, dimana pemerintah daerah mampu merealisasikan target pendapatan asli daerah (di atas 100%). Meskipun demikian, pencapaian ini sering kali dianggap wajar sebab pemerintah daerah pada dasarnya memasang target di bawah potensi pendapatan yang apabila

dimaksimalkan nilai pendapatan yang diterima dapat jauh lebih besar dari anggaran yang telah direncanakan. Hal tersebut dilakukan agar terkesan bahwa pemerintah dapat mengklaim keberhasilan dalam merealisasikan target sebagaimana yang telah direncanakan. Dengan kata lain, anggaran kerap dibuat lebih kecil dari potensi penerimaan pendapatan yang

mungkin dapat diperoleh oleh pemerintah daerah (Habiburrahman, 2016).

Asumsi tersebut mungkin terjadi pula di Kabupaten Lebak. Pendapatan asli daerah

Kabupaten Lebak pada tahun anggaran 2019 secara lebih mendetail spesifik pada pendapatan pajak dan retribusi daerah sebagaimana tersaji pada tabel berikut ini.

Tabel 9. Jenis PAD berdasarkan anggaran dan realisasi

Jenis PAD		Anggaran	Realisasi	%
Pajak daerah	Pajak hotel	320.400.000	369.683.930	115.38
	Pajak Restoran	5.000.000.000	6.661.576.327	133.23
	Pajak Hiburan	350.000.000	383.134.597	109.47
	Pajak Reklame	650.800.000	786,003.738	120.78
	Pajak Penerangan Jalan	18.300.000.000	18.661.399,931	101.97
	Pajak Parkir	219.600.000	290.185.040	132.14
	Pajak Air Tanah	135.000.000	146.536.317	108.55
	Pajak Burung Walet dan Sejenisnya	3.200.000	5.256.300	164.26
	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan	16.845.450.000	21.069.134.367	125.07
	PBB Pedesaan dan Perkotaan	22.580.550.000	27.224.421.309	120.57
	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	20.220.000.000	25.261.834.849	124.93
	Total		84.625.000.000	100.859.166,705
Retribusi Daerah	Retribusi Jasa Umum	8.239.240.000	9.106.524.500	110.53
	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	450.080.000	488.800.000	108.60
	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan umum	258.680.000	241.696.700	93.43
	Retribusi Pelayanan Pasar	2.661.290.000	2.613.342.000	98.20
	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	387.162.500	438.225.000	113.19
	Penyediaan/penyedotan Kakus	43.774.500	36.900.000	84.30
	Pelayanan Tera Ulang	45.471.600	55.352.100	121.73
	Pengendalian Menara Telekomunikasi	600.000.000	725.760.000	120.96
	Pemakaian kekayaan daerah	3.161.301.000	3.535.298.524	111.83
	Retribusi Pelelangan Ikan	1.000.589.500	1.289.504.000	128.87
	Retribusi Terminal	504.064.000	461.430.000	91.54
	Retribusi rumah potong hewan	32.000.000	32.220.000	100.69
	Retribusi tempat rekreasi dan olah raga	318.225.000	323.600.000	101.69
	Retribusi penjualan produksi usaha daerah	285.000.000	316,015,000	110.88
	Retribusi izin mendirikan bangunan	3.500.000.000	3.599.056.570,00	102.83
	Retribusi izin trayek	91.743.000	112.100.000.00	122.19
	Retribusi izin perikanan	44.000.000	44.000.000.00	100.00
Total		21.622.621.100,00	23.419.824.394.00	108.31

Sumber: Data sekunder diolah, 2021

Mengacu pada tabel di atas dapat dilihat bahwa pos pemasukan pendapatan asli daerah yang paling terbesar untuk kategori pajak berasal dari jenis pajak PBB Pedesaan dan Perkotaan dengan nilai 27 Miliar. Sementara pendapatan asli daerah dari jenis pajak lainnya terbilang kecil seperti pajak hotel, restoran, hiburan dan parkir. Sementara, pendapatan asli daerah kategori retribusi yang paling tinggi berasal dari jenis retribusi pelayanan umum sebesar 9 Miliar. Retribusi pelayanan umum yang dimaksud berasal dari pelayanan kesehatan.

Seluruh pos anggaran, secara garis besar dapat telah memenuhi target dengan realisasi lebih dari 100% meskipun apabila melihat nilai real, besaran pendapatan asli daerah yang diterima belum signifikan dalam meningkatkan penerimaan APBD. Dengan kata lain terdapat dua kemungkinan yang dapat menjelaskan hal tersebut. Pertama, pemerintah Kabupaten Lebak menargetkan anggaran yang lebih rendah dari kemungkinan pendapatan yang dapat diperoleh. Kedua, pemerintah Kabupaten Lebak belum optimal dalam menggali potensi sumber daya yang dapat dikonversi menjadi pendapatan asli daerah.

Hal ini misalnya dipertegas oleh kenyataan bahwa wilayah Kabupaten Lebak memiliki sumber daya alam yang

melimpah dan beragam berupa hutan, laut, kebun, tambang. Seharusnya, hal tersebut menjadi potensi untuk menggali pos penerimaan APBD, misalnya dengan cara mengoptimalkan kawasan pariwisata, perikanan, dan pertambangan sehingga dapat meningkatkan pajak dan retribusi daerah. Namun, sebagaimana tersaji pada tabel di atas, justru pajak dan retribusi terbesar bukan berasal dari potensi sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Lebak.

5. Rasio efisiensi

Rasio ini digunakan sebagai indikator untuk menilai seberapa jauh kemampuan keuangan daerah dilihat dari perbandingan antara realisasi belanja daerah (pengeluaran) dengan realisasi pendapatan daerah. Hal ini bertujuan memotret tingkat efisiensi keuangan daerah. Efisiensi menjadi penting sebab merupakan salah satu prinsip dalam tata kelola keuangan. Semakin kecil nilai rasio efisiensi mencerminkan bahwa kinerja pemerintah dalam membelanjakan pendapatannya semakin baik sehingga mampu berkontribusi dalam peningkatan pendapatan daerah. Adapun indikator untuk mengukur tingkat rasio efisiensi dapat dilihat pada tabel 10 dan Rasio efisiensi keuangan Kabupaten Lebak tahun anggaran 2018, 2019, dan 2020 tersaji pada tabel 11.

Tabel 10. Kriteria Kinerja Keuangan

Persentase kinerja keuangan (%)	Kriteria
Di bawah 60	Sangat efisien
60-80	Efisien
80-90	Cukup efisien
90-100	Kurang efisien
Di atas 100	Tidak efisien

Sumber: Keputusan Mendagri No. 690.900.327 Tahun 1996

Tabel 11. Realisasi Belanja Daerah dan Realisasi Pendapatan Daerah

Tahun anggaran	Realisasi Belanja Daerah	Realisasi Pendapatan Daerah	Persentase	Keterangan
2018	2.447.025.136.764	2.504.433.551.432	98 %	Kurang efisien
2019	2.658.286.134.993	2.676.822.234.189	99 %	Kurang efisien
2020	2.497.002.959.537	2.547.087.060.222	98 %	Kurang efisien

Sumber: Data sekunder diolah, 2021

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa rasio efisiensi Kabupaten Lebak pada tahun anggaran 2018-2020 relatif stagnan dengan kriteria kurang efisien. Pada tahun anggaran 2018, realisasi belanja daerah sebesar 2.447.025.136.764 dibagi dengan realisasi pendapatan daerah yakni sebesar 2.504.433.551.432 sehingga persentase rasio yang muncul adalah 98%. Pada tahun anggaran 2019, realisasi belanja daerah sebesar 2.658.286.134.993 dibagi dengan jumlah realisasi pendapatan daerah sebesar 2.676.822.234.189 sehingga memunculkan angka persentase rasio efisiensi 99%. Tahun anggaran 2020, realisasi belanja daerah sebesar 2,497,002,959,537 dibagi dengan realisasi pendapatan daerah sebesar 2,547,087,060,222 sehingga persentase rasio yang muncul adalah 98%.

Rasio efisiensi pada dasarnya tidak hanya terkait soal sejauh mana kemampuan daerah membelanjakan

anggaran yang diperoleh dari pendapatan daerah. Karena apabila hal tersebut menjadi acuan utama, maka tidak sulit bagi pemerintah daerah untuk “menghabiskan” anggaran yang dimiliki. Hal yang substantif terletak pada sejauh mana belanja anggaran tersebut berdampak pada pembangunan daerah. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan bahwa alokasi belanja daerah harus dipastikan mampu berkontribusi terhadap pendapatan daerah. Selain itu, perlu upaya untuk melakukan pengawasan yang ketat untuk menghindari kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan anggaran belanja daerah seperti pemborosan anggaran, *mark up*, dan korupsi, dan tindakan melawan hukum lainnya. Hal ini bertujuan agar rasio efisiensi anggaran Kabupaten Lebak mendapat kategori baik pada tahun-tahun berikutnya, mengingat dalam kurun waktu tiga tahun anggaran berturut-turut, rasio

efisiensi keuangan Kabupaten Lebak belum efektif.

6. *Share and Growth*

Share and Growth merupakan dua entitas yang saling terkait satu sama lain. Keduanya dapat menjadi rujukan yang berguna untuk memotret kemampuan keuangan daerah serta dengan mempertimbangkan juga perkembangan arus pendapatan dan belanja. *Share* adalah rasio pendapatan asli daerah terhadap belanja. Rasio ini digunakan untuk menilai sejauh mana kemampuan daerah dalam membiayai kegiatan rutin dan pembangunan. Dengan demikian rumus yang digunakan untuk menghitung *Share* adalah total pendapatan asli daerah dibagi dengan total belanja.

Sementara *Growth* adalah rasio pertumbuhan Pendapatan asli daerah dengan PDRB untuk mengetahui sejauh mana fleksibilitas dan elastisitas pendapatan asli daerah terhadap

pembangunan ekonomi di daerah yang bersangkutan. Rumus untuk menghitung *Growth* adalah jumlah pendapatan asli daerah pada periode tertentu (PAD-i) dibagi dengan jumlah pendapatan asli daerah pada periode sebelumnya (PAD-i-1). Keterkaitan antara *Share* dan *Growth* nampak pada kuadran berikut ini.

Tabel 12. Kuadran Share and Growth

Kuadran I <i>Share</i> tinggi, <i>Growth</i> tinggi	Kuadran II Share rendah, <i>Growth</i> tinggi
Kuadran III Share tinggi, <i>Growth</i> Rendah	Kuadran IV Share rendah, <i>Growth</i> rendah

Nilai *Share* Kabupaten Lebak periode anggaran 2018-2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 13. PAD dan Total Belanja

Tahun Anggaran	PAD	Total Belanja	Nilai
2018	308.912.592.160	2.707.075.580.544	11%
2019	333.766.548.700	2.982.610.098.541	11%
2020	338.941.257.475	2.747.614.915.401	12%
Rata-rata Share			11,5%

Sumber: Data sekunder diolah, 2021

Mengacu pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai share keuangan Kabupaten Lebak selama tiga tahun anggaran (2018-2020) cenderung stabil tanpa mengalami penurunan maupun

kenaikan. Namun stabilitas tersebut menunjukkan nilai yang rendah. Rata-rata nilai *share* yang mencerminkan perbandingan antara pendapatan asli daerah dengan total belanja berada pada nilai 11,

5%. Perolehan nilai yang tergolong cukup rendah. Dengan kata lain, nilai *share* keuangan Kabupaten Lebak dalam periode tiga tahun terakhir stabil dengan nilai

rendah. Artinya, tidak ada perubahan yang signifikan ke arah tata kelola keuangan yang lebih baik.

Tabel 14. PAD dimensi Growth

Tahun Anggaran	PAD-i	PAD-i-1	Nilai
2018	308.912.592.160	320.167.214.575	9,6 %
2019	333.766.548.700	308.912.592.160	10 %
2020	338.941.257.475	333.766.548.700	10 %
Rata-rata Growth			10 %

Sumber: Data sekunder diolah, 2021

Tabel di atas memperlihatkan bahwa nilai *Growth* keuangan Kabupaten Lebak pada periode anggaran 2018-2020 cenderung stabil, namun stabil dengan perolehan nilai yang rendah (tidak lebih dari 10%). Tahun anggaran 2018 jumlah pendapatan asli daerah sebesar 308.912.592.160 dibagi dengan total pendapatan asli daerah tahun sebelumnya yakni tahun 2017 sebesar 320.167.214.575 menghasilkan persentase nilai 9,6%. Tahun anggaran 2019 jumlah pendapatan asli daerah sebesar 333.766.548.700 dibagi dengan total pendapatan asli daerah tahun sebelumnya sebesar 308.912.592.160 menghasilkan persentase nilai 10%. Tahun anggaran 2020 jumlah pendapatan asli daerah sebesar 338.941.257.475 dibagi dengan total pendapatan asli daerah tahun sebelumnya sebesar 333.766.548.700 menghasilkan persentase nilai 10%. Terdapat kenaikan nilai *Growth* pada tahun anggaran 2019 meskipun tidak signifikan yaitu 1%. Nilai *growth* tahun

anggaran 2019 tidak mengalami perubahan yang berarti pada tahun 2020. Secara keseluruhan, rata-rata *growth* keuangan Kabupaten Lebak tergolong rendah.

Berdasarkan perhitungan *share* dan *growth* terhadap anggaran Kabupaten Lebak dari tahun 2018-2020, diketahui bahwa nilai rata-rata *share* sebesar 11,5% dan *growth* sebesar 10%. Nilai *share* dan *growth* sama-sama rendah. Dengan demikian, apabila dipetakan dalam kuadran, kemampuan keuangan daerah Kabupaten Lebak berada dalam kuadran IV. Kondisi tersebut tidak ideal. Kontribusi pendapatan asli daerah terhadap total belanja sangat minim, begitu pula potensi pertumbuhan pendapatan asli daerah setiap tahun sangat rendah. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Lebak dituntut agar lebih kreatif, inovatif dan memperbaiki kinerja keuangan sehingga mampu meningkatkan pendapatan asli daerah semata-mata untuk tujuan

pembangunan daerah dan kepentingan publik.

7. Analisa Varian Pendapatan

Indikator ini menjelaskan rasio antara realisasi pendapatan dengan anggaran pendapatan. Hal ini yang membedakan dengan rasio efektivitas. Rasio efektivitas spesifik pada pendapatan asli daerah sedangkan analisa varian pendapatan mencakup keseluruhan

pendapatan yang diterima oleh daerah. Meski berbeda, namun tujuannya sama yaitu untuk mengukur kemampuan daerah merealisasikan total pendapatan sesuai dengan perencanaan anggaran. Hal tersebut membantu menjelaskan seberapa optimal upaya daerah meningkatkan pendapatan yang digunakan untuk membiayai belanja daerah.

Tabel 15. Realisasi Pendapatan dan Anggaran Pendapatan

Tahun Anggaran	Realisasi Pendapatan	Anggaran Pendapatan	Nilai (%)
2018	2.504.433.551.432	2.511.747.359.526	99,7%
2019	2.676.822.234.189	2.734.655.051.800	97,8%
2020	2.547.087.060.222	2.500.728.711.965	101,8%

Sumber: Data sekunder diolah, 2021

Tabel di atas memperlihatkan bahwa analisa varian pendapatan keuangan daerah Kabupaten Lebak tahun anggaran 2018-2020 sudah efektif. Rasio antara realisasi pendapatan dan anggaran pendapatan mendapatkan rata-rata nilai 90-100%. Artinya, pemerintah daerah dianggap telah mampu mencapai target penerimaan sebagaimana yang telah direncanakan. Pada tahun anggaran 2018, realisasi pendapatan sebesar 2.504.433.551.432 dibagi jumlah anggaran pendapatan yang direncanakan sebesar 2.511.747.359.526 menghasilkan nilai 99,7%. Pencapaian ini mengalami penurunan pada tahun anggaran 2019, dimana realisasi pendapatan sebesar 2.676.822.234.189 dibagi jumlah anggaran

pendapatan yang direncanakan sebesar 2.734.655.051.800 menghasilkan nilai 97,7%. Namun pada tahun anggaran 2020, nilai varian pendapatan mengalami kenaikan menjadi 101,8% yang diperoleh dari realisasi pendapatan sebesar 2.547.087.060.222 dibagi jumlah anggaran pendapatan yang direncanakan sebesar 2.500.728.711.965. Artinya, varian pendapatan selama tiga tahun berturut-turut bersifat fluktuatif, meskipun masih dalam kategori efektif.

8. Analisis Pertumbuhan Pendapatan

Analisis pertumbuhan pendapatan adalah indikator yang dipakai untuk mengukur rasio pertumbuhan pendapatan dengan PDRB. Rasio ini berguna untuk mengetahui sejauh mana tingkat elastisitas

pendapatan daerah terhadap pembangunan ekonomi pada daerah yang bersangkutan. Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung analisis pertumbuhan pendapatan adalah total pendapatan pada tahun tertentu (Pendapatan tahun t) dikurangi total pendapatan tahun

sebelumnya (pendapatan tahun t-1) kemudian dibagi jumlah total pendapatan tahun sebelumnya (pendapatan tahun t-1).

Pertumbuhan pendapatan keuangan Kabupaten Lebak pada tahun anggaran 2018-2020 tersaji pada tabel di bawah ini:

Tabel 16. Realisasi Pendapatan dan Rasio Pertumbuhan Pendapatan

Tahun Anggaran	Realisasi Pendapatan	Rasio Pertumbuhan Pendapatan	Kriteria
2018	2.504.433.551.432	3,4%	Positif
2019	2.676.822.234.189	6,8%	Positif
2020	2.547.087.060.222	-4,8%	Negatif

Sumber: Data sekunder diolah, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa rasio pertumbuhan pendapatan APBD Kabupaten Lebak tahun 2018 sebesar 3,4%. Pencapaian ini mengalami kenaikan dua kali lipat pada tahun 2019 dengan rasio pertumbuhan sebesar 6,8%. Meskipun demikian, peningkatan tersebut belum konsisten. Pada tahun 2020, rasio pertumbuhan pendapatan justru mengalami penurunan dengan nilai rasio -4,8%. Secara keseluruhan, rasio pertumbuhan pendapatan APBD Kabupaten Lebak tahun anggaran 2018-2020 belum menunjukkan performa yang baik. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan upaya-upaya meningkatkan pertumbuhan pendapatan daerah.

9. Analisis varian Belanja

Analisis varian belanja mengukur kemampuan daerah menyerap belanja yang telah dianggarkan. Oleh karena itu, rumus untuk menilai analisis varian belanja adalah jumlah realisasi belanja dikurangi anggaran belanja. Kinerja keuangan pemerintah daerah varian belanja dapat dikatakan baik apabila total realisasi belanja tidak melebihi anggaran belanja yang telah ditargetkan.

Analisa varian belanja pada APBD Kabupaten Lebak tahun anggaran 2018-2020 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 17. Realisasi Belanja, Anggaran Belanja, dan Rasio Belanja

Tahun Anggaran	Realisasi Belanja	Anggaran Belanja	Rasio Belanja	Kriteria Kemampuan
2018	2.447.025.136.764	2.707.075.580.544	-260.050.443.780	Menguntungkan
2019	2.658.286.134.993	2.982.610.098.541	-324.323.963.548	Menguntungkan

2020	2.497.002.959.537	2.747.614.915.401	-250.611.955.864	Menguntungkan
------	-------------------	-------------------	------------------	---------------

Sumber: Data sekunder diolah, 2021

Tabel di atas menunjukkan bahwa belanja APBD Kabupaten Lebak tahun anggaran 2018 memiliki sisa anggaran sebesar 260.050.443.780. Sisa anggaran belanja pada tahun anggaran 2019 mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 324.323.963.548. Meskipun mengalami penurunan, rasio belanja tahun anggaran 2020 masih menyisakan anggaran sebesar 250.611.955.864. Secara keseluruhan, analisa varian belanja APBD Kabupaten Lebak selama tahun 2018-2020 menunjukkan trend positif, dimana realisasi anggaran tidak melebihi target belanja yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pemerintah Kabupaten Lebak dapat dikatakan memiliki perencanaan yang baik terkait belanja daerah.

10. Analisis Pertumbuhan Belanja

Analisa pertumbuhan belanja adalah indikator untuk mengukur tingkat pertumbuhan belanja APBD dari tahun ke

tahun. Idealnya, total belanja daerah setiap tahun seharusnya terus mengalami peningkatan. Hal ini dikaitkan dengan asumsi bahwa semakin besar belanja daerah, maka semakin banyak aktivitas dan program pemerintah yang akan direalisasikan. Tujuannya adalah untuk mendorong pembangunan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Rumus menghitung pertumbuhan belanja adalah total realisasi anggaran belanja pada tahun tertentu (total belanja tahun t) dikurangi total realisasi belanja tahun sebelumnya (total belanja tahun t-1) kemudian dibagi lagi dengan total realisasi belanja tahun sebelumnya (total belanja tahun t-1). Adapun pertumbuhan belanja APBD Kabupaten Lebak tahun anggaran 2010-2020 sebagai berikut:

Tabel 18. Realisasi Belanja dan Rasio Pertumbuhan Belanja

Tahun Anggaran	Realisasi Belanja	Rasio Pertumbuhan Belanja (%)	Kriteria
2018	2.447.025.136.764	1 %	Positif
2019	2.658.286.134.993	9 %	Positif
2020	2.497.002.959.537	-6 %	Negatif

Sumber: Data sekunder diolah, 2021

Tabel di atas menunjukkan realisasi belanja APBD tahun anggaran 2018 sebesar 2.447.025.136.764 menghasilkan nilai pertumbuhan belanja sebesar 1%

dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan Belanja APBD tahun 2019 mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 9% dengan total

realisasi belanja sebesar 2.658.286.134.993. Meskipun demikian, pertumbuhan belanja mengalami penurunan pada tahun anggaran 2020 dengan nilai -6%. Dengan demikian, pertumbuhan belanja dalam kurun tahun anggaran 2018-2020 mengalami fluktuasi.

11. Kemampuan Mendanai Belanja Daerah

Indikator ini menyangkut seberapa besar kemampuan daerah mendanai belanja daerah. Hal tersebut tercermin dari

rasio antara seluruh pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan dengan seluruh belanja dan pengeluaran pembiayaan yang direncanakan. Idealnya, pemerintah daerah seharusnya mampu mendanai seluruh belanja menggunakan pendapatan yang dimiliki. Semakin besar rasio penerimaan daerah terhadap pengeluaran, semakin besar pula kemampuan mendanai belanja daerah. Dalam konteks Kabupaten Lebak, kemampuan mendanai belanja daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 19. Rasio Total Pendapatan dan Belanja

Tahun Anggaran	Total Pendapatan	Total Belanja	Rasio
2018	2.725.130.630.544	2.725.130.630.544	100%
2019	2.987.610.098.541	2.987.610.098.541	100%
2020	2.767.219.915.401	2.767.219.915.401	100%

Sumber: Data sekunder diolah, 2021

Mengacu pada tabel di atas dapat dilihat bahwa total pendapatan daerah berbanding lurus dengan total belanja. Implikasinya, kemampuan daerah mendanai belanja daerah selalu 100%. Namun dampaknya, daerah tidak memiliki SiLPA dari tahun anggaran yang berjalan. Padahal SiLPA salah satu pos penerimaan penting untuk digunakan pada tahun anggaran berikutnya. Kemampuan mendanai belanja daerah di Kabupaten Lebak termasuk ideal meskipun masih mainstream sebab mayoritas daerah tentu akan menyeimbangkan antara total pendapatan dan belanja. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Lebak diharapkan

dapat melakukan upaya-upaya anti-mainstream dimana pendapatan dapat lebih besar dibandingkan belanja tanpa mengurangi sedikit pun tujuan substansi pembangunan dan pelayanan publik, sehingga daerah memiliki SiLPA yang signifikan.

12. Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja

Belanja modal merupakan salah satu pos pengeluaran anggaran daerah yang paling penting karena terkait langsung dengan pertumbuhan dan layanan publik. Selain itu, belanja modal juga dapat menstimulus peningkatan penerimaan daerah. Oleh karena itu, anggaran daerah

yang sehat mensyaratkan proporsi belanja modal yang lebih besar dibandingkan dengan belanja lainnya. Semakin besar proporsi belanja daerah terhadap belanja daerah, maka semakin positif pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi dan kualitas layanan publik. Sebaliknya, anggaran belanja modal yang rendah,

berpotensi negatif terhadap pembangunan di daerah yang bersangkutan. Rumus untuk menghitung rasio belanja modal adalah total anggaran belanja modal dibagi dengan jumlah keseluruhan belanja daerah.

Rasio belanja modal APBD Kabupaten Lebak pada tahun anggaran 2018-2020 sebagai berikut:

Tabel 20. Rasio Total Belanja Modal terhadap Belanja Keseluruhan

Tahun	Total Belanja Modal	Total Belanja Keseluruhan	Rasio	Keterangan
2018	354.226.094.102	2.707.075.580.544	13%	Tidak seimbang
2019	474.510.291.053	2.982.610.098.541	16%	Tidak seimbang
2020	262.668.241.999	2.747.614.915.401	10%	Tidak seimbang

Sumber: Data sekunder diolah, 2021

Berdasarkan informasi yang tersaji pada tabel di atas, rasio belanja modal terhadap total keseluruhan belanja menunjukkan hasil yang tidak seimbang. Tahun anggaran 2018, nilai rasio belanja modal sebesar 13 %. Pada tahun anggaran 2019 mengalami kenaikan menjadi 16%, namun pada tahun anggaran 2020 menurun pada angka 10%. Selama tiga tahun anggaran tersebut, rasio belanja modal masih sangat rendah. Padahal, proporsi belanja modal yang ideal adalah minimal 30% dari total keseluruhan belanja daerah sehingga daerah memiliki banyak aset tetap jangka panjang yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Lebak diharapkan memberikan perhatian lebih dalam pembagian komponen pengeluaran

daerah dengan memberikan proporsi yang lebih ideal terhadap belanja modal.

13. Belanja Pegawai Terhadap Belanja Daerah

Indikator ini menjelaskan proporsi belanja pegawai terhadap belanja daerah. Berbanding terbaik dengan analisa belanja modal, belanja pegawai memiliki logika berfikir bahwa semakin kecil pengeluaran belanja pegawai terhadap keseluruhan belanja daerah, maka kualitas belanja daerah dianggap positif. Penurunan proporsi belanja pegawai (terutama belanja pegawai tidak langsung) diharapkan dapat meningkatkan belanja langsung terutama belanja modal dan belanja barang dan jasa) karena hal tersebut sangat terkait dengan aspek pelayanan publik.

Rasio belanja pegawai terhadap belanja daerah Kabupaten Lebak pada

tahun anggaran 2018-2020 sebagai berikut:

Tabel 21. Rasio Belanja Pegawai dan Belanja Daerah

Tahun anggaran	Belanja Pegawai	Belanja Daerah	Rasio
2018	1.065.581.673.248	2.707.075.580.544	39%
2019	1.099.710.831.483	2.982.610.098.541	37%
2020	1.058.519.078.781	2.747.614.915.401	38%

Sumber: Data sekunder diolah, 2021

Mengacu pada tabel diatas, proporsi belanja pegawai terhadap total keseluruhan belanja daerah pada tahun anggaran 2018 sebesar 39%. Nilai rasio ini turun tipis pada tahun anggaran 2019 menjadi 37 %. Namun, mengalami kenaikan menjadi 38% pada tahun anggaran 2020. Secara keseluruhan, analisa belanja pegawai terhadap belanja daerah di Kabupaten Lebak masih terbilang cukup besar dibandingkan dengan rasio belanja modal. Idealnya, rasio belanja modal lebih besar dari pada belanja pegawai. Terlebih, bagi daerah yang menyandang status sebagai daerah tertinggal, proporsi belanja langsung sebaiknya lebih ditingkatkan karena berkaitan langsung dengan pembangunan dan pelayanan publik.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap sejumlah indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja tata kelola dan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Lebak periode anggaran 2018-2019 dapat disimpulkan bahwa secara garis besar kinerja keuangan (APBD)

Kabupaten Lebak belum menunjukkan performa yang baik. Berbagai indikator memperlihatkan hasil kurang memuaskan dengan nilai persentase rendah. Secara keseluruhan, berbagai indikator menunjukkan pola yang sama, dimana trend positif yang ditandai oleh rasio kinerja keuangan meningkat terjadi pada tahun anggaran 2019 dibandingkan tahun anggaran sebelumnya. Namun mengalami penurunan dengan hasil rasio negatif terjadi pada tahun anggaran 2020. Hal ini terjadi karena pada tahun 2019 terdapat peningkatan pendapatan APBD dibandingkan tahun 2018 dan 2020, sehingga menjadi realitas yang wajar apabila tahun 2019 menghasilkan kinerja keuangan yang positif meskipun belum dapat dikatakan signifikan sebab hasil pencapaian tersebut tergolong kecil.

Hasil kinerja keuangan daerah yang rendah ternyata berbanding lurus dengan kondisi pembangunan di Kabupaten Lebak yang masih tergolong daerah tertinggal, dibuktikan dengan IPM yang rendah. Berpijak pada hasil analisa kinerja keuangan daerah Kabupaten Lebak tahun

anggaran 2018-2020, Nampaknya kinerja keuangan daerah pada tahun yang akan datang tidak akan berbeda jauh dengan hasil kinerja keuangan yang masih rendah. Kecuali, pemerintah melakukan sejumlah inovasi kebijakan substantif, seperti inovasi kebijakan terkait upaya meningkatkan potensi PAD.

Berangkat dari persoalan ini, artikel ini merumuskan beberapa rekomendasi. Pertama, perlu ada konsistensi antara perencanaan dan penganggaran. Perencanaan penganggaran disesuaikan dengan kebutuhan dan persoalan nyata yang tengah dihadapi masyarakat di Kabupaten Lebak. Saat ini, Kabupaten Lebak masih bermasalah dengan kualitas pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, dan ekonomi). Oleh karena itu, perencanaan anggaran sebaiknya lebih banyak difokuskan pada hal ini dengan mengalokasikan anggaran lebih besar, terutama pos belanja modal dan belanja barang dan jasa.

Kedua, pemerintah Kabupaten Lebak perlu menggali pendapatan asli daerah secara optimal. Terutama memaksimalkan potensi pariwisata. Hal ini bisa dilakukan dengan menggandeng pihak swasta dan komunitas lokal (*multi stakeholders partnership*). Memaksimalkan potensi sektor pariwisata diharapkan dapat meningkatkan pemasukan pajak dan retribusi.

Ketiga, mendorong kebijakan penganggaran yang efektif, efisien, dan berpihak pada kepentingan publik. Misalnya, proporsi belanja pegawai tidak langsung dipangkas sehingga belanja barang dan jasa dan belanja modal lebih besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, K., & Mursinto. (2014). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesenjangan Ekonomi Antar Daerah Serta Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten / Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2006 – 2010. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 24 (3), 187-197.
- Ahmad, F., & Ali, A. (2011). Decentralised Governance and People Participation in Local Development. *Indian Journal of Public Administration*, 57(2), 234–241.
<https://doi.org/10.1177/0019556120110206>
- Booth, A. (2003). Decentralization and Poverty Alleviation in Indonesia. *Environment and Planning C: Government and Policy*, 21(2), 181–202. <https://doi.org/10.1068/c0127>
- Brodjonegoro, B., & Asanuma, S. (2000). Regional Autonomy and Fiscal Decentralization in Democratic Indonesia. *Hitotsubashi Journal of Economics*, 41(2), 111–122.
<http://www.jstor.org/stable/43296034>
- Ezcurra, R. (2015). Fiscal decentralization and internal conflict: an empirical investigation. *Environment and Planning C: Government and Policy*,

33(3), 580–600.
<https://doi.org/10.1068/c13141r>

Halim, Abdul. (2002). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Pertama. Jakarta: Salemba Empat.

Kyriacou, A. P., & Roca-Sagalés, O. (2011). Fiscal and Political Decentralization and Government Quality. *Environment and Planning C: Government and Policy*, 29(2), 204–223.
<https://doi.org/10.1068/c1016r>

Pepinsky, T. B., & Wihardja, M. M. (2011). Decentralization and Economic Performance in Indonesia. *Journal of East Asian Studies*, 11(3), 337–371.
<http://www.jstor.org/stable/2341904>
1

Samekto, A. (2012). The Impacts of Budget Decentralization on Economic Growth and Local Government Performance. *Journal of Economics, Business, and Accountancy Ventura*, 15 (1), 157-170.

Saputra B., & Mahmudi. (2012) Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan Masyarakat. *JAAI*, 16 (2), 185-199

Sijabat, R. (2016). Fiscal Decentralization and Sustainable Development: Lesson in Indonesia. *Asia-Pacific Journal of Rural Development* 26 (1), 1-60.
<https://doi.org/10.1177/1018529120160101>.